

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Patani Raya terletak di wilayah Selatan negara Thailand. Sebelum berintegrasi dengan Thailand, Patani merupakan kerajaan Islam terbesar dengan penduduk mayoritas muslim, dengan jumlah penduduk adalah 423.562 jiwa atau 77,75 %, dan luas wilayah 2.109 km<sup>2</sup>.<sup>1</sup> Secara historis, etnis Melayu-Muslim di Thailand Selatan awalnya merupakan suatu kerajaan tersendiri yang dikenal dengan Kerajaan Patani Raya. Namun, sejak akhir abad 18 kerajaan tersebut menjadi taklukan Raja Siam. Meskipun takluk kepada Bangkok, Patani bukanlah bagian integral dari kerajaan Siam. Secara kultural Patani tetap otonom, tata cara pemerintahan dan pengaturan kehidupan sosial budaya tetap didasarkan atas sendi-sendi kebudayaan agama, yaitu adat melayu dan Islam.<sup>2</sup>

Pada tanggal 20 Desember 1902 saat ditandatanganinya perjanjian perbatasan antara wilayah jajahan Inggris di Semenanjung Malaya dan Kerajaan Siam, daerah Patani Raya secara definitif mulai menjadi bagian integral dari Kerajaan Siam. Sehingga otonomi budaya orang Melayu-Muslim mulai terancam. Pengintegrasian secara paksa ke pusat negara Thailand tersebut menimbulkan reaksi keras dari kelompok minoritas. Mereka merupakan minoritas di dalam

---

<sup>1</sup> Surin Pitsuwan, "*Islam di Muangthai: Nasionalisme Masyarakat Patani*", terj. Hasan Basari, Penerbit LP3ES, Jakarta 1989, hal 13

<sup>2</sup> Negara selaku pengemban adat dan agama pada dasarnya merupakan suatu kesatuan organis yang ditunjukkan dalam lembaga-lembaga syi'ah, pendidikan dan kesultanan. Lihat Uthai Dulyakesem "*Muslim Malay Separatism in Southern Thailand: Factors Underlying The Political Disunity*" dalam Tim-Loe Loo dan Vani S (eds) *Armed Separatism in southeast Asia* (Singapore:

negara yang sebagian besar adalah orang Thai, yang beragama Buddha.<sup>3</sup> Sejak pertama kali program pembaruan di Patani, pada tahun 1903 aksi perlawanan dan pemberontakan sering terjadi guna merebut kembali otonomi dari pemerintah pusat.

Aksi perlawanan dan pemberontakan rakyat Patani ini oleh pemerintah Thailand disebut sebagai gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari negara Thailand. Kebanyakan dari sekitar 170 negara bangsa memiliki sejumlah besar penduduk minoritas, meskipun sudah berasimilasi cukup lama dengan kelompok-kelompok penduduk lainnya, banyak kelompok minoritas yang masih merasa terpisah dan berbeda. Rasa berbeda ini berkembang menjadi gerakan separatis dengan dilontarkannya tuntutan formal pemisahan wilayah untuk membentuk negara sendiri, atau setidaknya otonomi integral yang bebas dari pengaturan negara induk. Tuntutan separatis ini biasanya ditolak oleh pemerintah pusat, karena mengancam integritas politik dan wilayahnya.<sup>4</sup>

Konflik berkepanjangan ini terjadi sejak tahun 1903, namun hingga saat ini belum ada satupun penyelesaian yang dapat membuat rakyat Patani hidup dalam damai. Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk menulis sebuah karya ilmiah berjudul **“Pendekatan Pemerintah Thailand dalam Menyelesaikan Konflik dengan Rakyat Patani”**.

---

<sup>3</sup> Budiawan, “Gerakan Melayu-Muslim di Muangthai Selatan”, Dalam Majalah Prisma Edisi 8 Agustus 1994, hal 57.

<sup>4</sup> Walter S. Jones, “Logika Hubungan Internasional”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1993, hal 185

## B. Latar Belakang Masalah

Kalau ditelusuri, realita konflik antara Patani dengan Pemerintah Thailand, bersemi sejak awal hubungan Patani dengan Thailand. Pada tahun 1902, oleh Raja Rama V kerajaan Patani dianeksasi ke dalam kerajaan Thailand dengan cara menjadikannya sistem administrasi wilayah dengan sebutan "*Thesaphiban*" yang berarti unit-unit administrasi yang semi otonom. Pada tahun 1909, Pemerintah Inggris dan Thailand menandatangani perjanjian yang dikenal dengan *The Angle-Thai Treaty 1909*, hasil dari keputusan tersebut, yaitu negara Patani hilang dan menjadi bagian dari Kerajaan Thailand.<sup>5</sup>

Setelah kekuasaan negara Patani hilang, Tengku Abdulkadir Kamarudin, pemimpin terakhir negara Patani melakukan gerakan perlawanan terhadap pemerintah Thailand. Perlawanan yang dilakukan Raja Abdul Kadir menempuh dua strategi, yaitu: *pertama*, aksi perlawanan umum guna memancing penindasan yang lebih keras. Sehingga emosi masa yang lebih besar bisa mudah dibangkitkan. *Kedua*, meminta bantuan asing, dalam hal ini Inggris, yang pada waktu itu sedang menaruh perhatian besar terhadap negeri-negeri Melayu.<sup>6</sup> Tetapi cara-cara tersebut gagal karena Raja Abdul Kadir kemudian ditangkap dan dipenjara di propinsi Phitsanuloke.

---

<sup>5</sup> Chidchanok Rahimmula, "*Resolusi Damai: Studi Kasus Gerakan Sparatis dan Teroris di Propinsi-Propinsi Perbatasan di Selatan Thailand*", Makalah Regional Workshop dalam Yunanto S, et, al, "*Gerakan Militan Islam di Indonesia dan Asia Tenggara*", Friedrich-Ebert Stiftung (FES), The Ridep Institute, Jakarta 2003, hal 201

<sup>6</sup> Kees Van Dijk, "*Mengatasi Separatisme: Apakah Ada Jalan Keluar?*" dalam Dewi Fortuna Anwar (et. al) "*Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi, Politik, dan*

Pada akhir abad 18, Bangkok mengadakan pembenahan organisasi kerajaan-kerajaan *tributary* (kerajaan-kerajaan Melayu taklukan Siam di sebelah Selatan). Pembenahan organisasi ini mengakibatkan pusat memiliki kontrol yang berlebihan terhadap kerajaan-kerajaan *tributary* tersebut. Hal ini menimbulkan ketidaksukaan rakyat Patani terhadap Kerajaan Siam dan berdampak pada hilangnya kekuasaan politik *de facto* dan *de jure* raja dan para bangsawan kerajaan Patani.<sup>7</sup>

Konflik akibat gerakan separatisme di propinsi Patani wilayah Thailand Selatan sudah berlangsung selama satu abad. Kemudian kembali muncul ke permukaan pada akhir tahun 2001, dan pada Januari 2004, terjadi peristiwa perampokan dan penyerangan gudang persenjataan militer di wilayah Thailand Selatan. Peristiwa tersebut menewaskan empat tentara dan lebih dari 300 persenjataan berbahaya hilang. Kejadian tersebut membuka kembali konflik pemerintah dengan kelompok separatis.

Kemudian tragedi Tak Bai tanggal 25 Oktober 2004 menjadi persoalan dan gejolak baru. Tragedi tersebut berawal dari aksi unjuk rasa sekitar 1500 warga muslim di depan kantor polisi untuk menuntut pembebasan sejumlah warga yang ditahan sebagai tersangka militan.<sup>8</sup> Aksi tersebut menimbulkan banyak korban, sekitar 80 warga muslim meninggal di tangan tentara Thailand.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Wukir Amintari Rukmi, "*Masalah Integrasi Nasional di Thailand Bagian Selatan: Studi Kasus Etnis Muslim Melayu*", Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 1996, hal 29-31

<sup>8</sup> Kompas, "*Thailand Antisipasi Kerawanan Keamanan Di Wilayah Selatan*", 08 November 2004, diakses tanggal 2 Oktober 2006

<sup>9</sup> Ibid, Laporan dari Thailand Selatan oleh Mulyawan Karim, "*Perang Melawan Bayang-Bayang*" 19 Juni 2006, diakses tanggal 22 November 2006

Akar gerakan separatis Muslim Patani berawal dari abad ke-18 saat Thailand yang dulu bernama Kerajaan Siam menginvasi Kesultanan Patani (yang berdiri sejak tahun 1457), membunuh penguasanya dan membasmi keturunannya.<sup>10</sup> Pemberontakan berikutnya dan periode kemerdekaan berakhir saat wilayah yang saat ini dikenal sebagai propinsi selatan Thailand digabungkan secara resmi tahun 1902. Etnis Melayu di provinsi Selatan Thailand menginginkan kembalinya kejayaan Islam di Asia Tenggara saat Kerajaan Patani menjadi pusat perdagangan yang makmur. Organisasi Kemerdekaan Patani Bersatu atau *Pattani United Liberation Organisation* (PULO) berdiri tahun 1968 dan menjadi gerakan separatis utama di Thailand pada dasawarsa 1970-an dan 1980-an. Tujuan dari gerakan ini adalah terbentuknya negara Islam merdeka dan terpisah dari sistem pemerintahan Thailand.

Serangkaian kerusuhan separatis di Patani membawa korban jiwa lebih dari 1800 orang sejak Januari 2004. Sebelum diberlakukannya peraturan darurat oleh PM Thaksin, terjadi serangkaian insiden yang menewaskan 1200 warga muslim di Narathiwat, Patani, dan Yala. Peristiwa pada tanggal 28 April 2004 juga mengakibatkan 107 jiwa militan meninggal dunia dan penyitaan di Masjid Kruese.<sup>11</sup> Pada tahun 2004-2005 ribuan nyawa muslim melayang. Menurut laporan *The Straits Times* edisi September 2005, sepanjang tahun 2005 konflik di Patani menelan korban jiwa sebanyak 369 orang, mereka adalah warga sipil, militer dan polisi Thailand, maupun pihak gerilyawan. Sementara pada tahun

---

<sup>10</sup> Masagi Elmuna, *Dua Ratus Penjajahan Siam (Thailand) Terhadap Malayu Patani*, Diakses dari [www.sinarharapan.com](http://www.sinarharapan.com) tanggal 13 Juni 2007, jam 13.30 WIB

<sup>11</sup> Nidhi Aeusrivongse, *Pemahaman terhadap Situasi di Thailand Selatan Melalui Perspektif Pemberontakan "Seribu Tahun"*, diakses dari

2004 korban jiwa sebanyak 668 orang.<sup>12</sup> Di perbatasan Thailand Selatan sendiri tercatat terjadi tiga kali pemberontakan bersenjata, yakni Partai Komunis Malaya, Partai Komunis Thailand, dan beragam faksi perlawanan Patani.

Dengan memberlakukan keadaan darurat di Patani oleh Perdana Menteri Thaksin Shinawatra bulan Juli 2005, yang kemudian diperpanjang setiap tiga bulan sekali, menjadi salah satu kebijakan dalam menyelesaikan konflik dengan rakyat Patani. Namun dekrit tersebut justru menjadi bumerang karena memicu perlawanan lebih keras dari kelompok separatis dan mengakibatkan kekerasan terhadap muslim terus akan berlanjut. Ancaman dari Front Pembebasan Patani Bersatu karena peristiwa di Tak Bai, membuat pemerintahan Thaksin mengontrol semua aktivitas warga dengan sangat ketat.

Ada dua hal penting yang menjadi persoalan umat Islam di Patani, yaitu pertama, kegagalan terhadap penyesuaian diri untuk bisa hidup di dunia modern dan global. Kedua, ada kesenjangan antara Utara dan Selatan. Ketika minoritas hidup dalam tekanan, kurang pendidikan, tidak bekerja, maka cara paling mudah adalah kembali ke jalan agama dan melakukan pemberontakan.

### **C. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan gambaran dari latar belakang muncul permasalahan yang menarik untuk dianalisis yakni:

“Bagaimanakah Kebijakan Thaksin Shinawatra dalam Mengelola Konflik di Patani?”

---

<sup>12</sup> Ibid.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Thailand dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Thailand Selatan.
- Memberikan gambaran tentang dinamika konflik yang berkepanjangan antara pemerintah Thailand dengan minoritas muslim Patani di Thailand Selatan.
- Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau pihak-pihak yang tertarik menggeluti masalah separatisme dan dinamika konflik di Thailand Selatan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

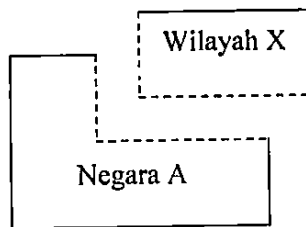
##### **(1) Konsep Separatisme**

Separatis adalah salah satu kunci militansi nasionalis yang merupakan wujud utama perang modern. Separatisme sendiri artinya adalah suatu kelompok yang memisahkan diri dari pemerintah pusat yang biasanya timbul dari rasa ketidakpuasan yang berkepanjangan atas kondisi subordinasi pemerintah pusat.<sup>13</sup>

Gerakan separatisme muncul karena ketidakpuasan yang berlarut-larut atas politik pemerintahan, pemilikan identitas teritorial yang berbeda atau ideologi yang dapat mendorong suatu masyarakat untuk menolak wewenang pemerintah pusat di wilayahnya. Dalam bentuk separatis terhadap suatu kelompok nasionalis,

etnis atau agama berusaha memisahkan diri dari negara untuk membentuk sebuah negara baru.<sup>14</sup>

#### Skema Separatis



Gambar: Model separatisme wilayah X melepaskan diri dari Negara A untuk membentuk Negara baru X

Sesungguhnya ada tiga alasan yang mendorong timbulnya separatisme di suatu negara menurut Allan Buchanan. Pertama, peninjauan kembali (*redictionary justice*). Kedua, pembagian yang tidak merata (*discriminatory redistribution*). Ketiga, alasan perlindungan budaya (*cultural self-presevation*).

Alasan pertama menyebutkan bahwa seseorang mempunyai bukti secara historis atas suatu kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif dimana kebijakan tersebut menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Kasus ini sering menjadi alasan yang paling mendasar dan paling kuat untuk memisahkan diri. Hal ini terjadi setelah berintegrasinya Patani dengan Thailand. Diantaranya ketika pemerintah membuat keputusan mengamandemen konstitusi di tahun 1930-an dan meleburkan wilayah Patani Raya ke dalam Kerajaan Siam. Kejadian ini menimbulkan kemarahan rakyat dan Peristiwa Namsai tahun 1922 merupakan wujud perlawanan mereka.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Walter S. Jones, *Op Cit*, hal 184

<sup>15</sup> Surin Pitsuwan, *Op. Cit.*



Alasan kedua menyebutkan masalah perimbangan kontribusi yang tidak merata; pemasukan yang diberikan Patani untuk devisa negara cukup besar, tetapi sayangnya setiap tahun anggaran, Patani justru menerima dana pembangunan lebih kecil dari yang seharusnya diterima, hal ini diperparah dengan banyaknya penyimpangan yang terjadi, mengakibatkan tidak adanya pemerataan pembangunan. Karena itu, sudah saatnya Patani yang menyumbang anggaran yang tidak sedikit untuk negara menerima kembali anggaran sesuai porsi. Ini berarti penghasilan yang diterima daerah, kini seharusnya tidak lagi dikumpulkan di pusat, tetapi tetap di daerah, kemudian baru disisihkan untuk pusat, dan diberikan untuk beberapa propinsi yang pemasukannya kecil. Dengan begitu akan terjadi pemerataan keuangan dan pembangunan sehingga tidak ada yang merasa kecewa dan dirugikan.

Alasan yang ketiga menyebutkan perlindungan budaya berasal dari keinginan memelihara budaya tradisi, agama dan bahasa dari dominasi etnis mayoritas. Telah umum diketahui bahwa sebagian masyarakat Patani menginginkan berlakunya syariat Islam di daerah mereka dengan lingkup ke-Thailand-an dan sebagian lagi menginginkan berdirinya negara Islam yang tentunya lepas dari negara Thailand. Bagi sebagian mereka yang menginginkan berdirinya negara Islam yaitu lepas dari negara Thailand berpandangan bahwa tidak mungkin menjalankan syariat Islam di dalam negara bukan Islam dan mereka menganggap wajar jika umat muslim menginginkan berdirinya syariat dan negara Islam. Justru jika ada muslim yang tidak menginginkan syariat Islam dan

menurut mereka misi Islam sudah jelas, Islam menghendaki agar apa yang dipandang baik harus terjadi dan dilaksanakan serta apa yang dipandang buruk harus lenyap dan dihindari. Hal ini tidak mungkin bisa terpenuhi selama umat Islam Patani berada di bawah penguasa negara yang tidak menghendaki berlakunya syariat Islam.

Gerakan separatisme yang terjadi di Selatan Thailand merupakan perlawanan warga lokal yaitu rakyat Patani yang merasa diperlakukan tidak adil selama ini. Perlawanan yang mereka lakukan adalah mengenai ketidakadilan dan hak sejarah. Hal tersebut terkait dengan pendudukan Patani oleh Thailand sekitar satu abad yang lalu. Patani diperintah oleh pemerintah Thailand setelah mereka mengubah infrastruktur melalui konsep terpusat. Lalu Patani mulai menuntut untuk dapat memerintah sebagai kaum Melayu. Mereka menginginkan satu gubernur Melayu.<sup>16</sup> Akibat ketidakadilan sosial, kemiskinan dan rendahnya pendidikan di Patani, banyak pemuda muslim bergabung dengan kelompok militan dan melakukan perlawanan bersenjata untuk menuntut pembentukan negara sendiri.

## (2) Teori Resolusi Konflik

Resolusi konflik menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama di antara kelompok-

---

<sup>16</sup> Ioannis Gatsiovni, *Thailand: Akar Dari Konflik di Wilayah Selatan*, Diakses dari [http://www.asiacalling.com/archives\\_ac\\_id.php?id\\_berita](http://www.asiacalling.com/archives_ac_id.php?id_berita) tanggal 13 Desember 2006 jam 13.34 WIB

kelompok yang bermusuhan.<sup>17</sup> Resolusi konflik, mengacu pada strategi-strategi untuk menangani konflik terbuka dengan harapan tidak hanya mencapai suatu kesepakatan untuk mengakhiri kekerasan (penyelesaian konflik) tetapi juga mencapai suatu resolusi dari berbagai perbedaan sasaran yang menjadi penyebabnya.<sup>18</sup>

Secara empirik, resolusi konflik dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama, mencari de-eskalasi konflik, dimana pada tahapan ini masih didominasi oleh strategi militer yang berupaya untuk mengendalikan kekerasan bersenjata yang terjadi. Tahap kedua, intervensi kemanusiaan dan negosiasi politik, memiliki orientasi politik yang bertujuan untuk memulai proses re-integrasi elit politik dari kelompok-kelompok yang bertikai. Tahap ketiga lebih bernuansa sosial dan berupaya untuk menerapkan *problem-solving approach*. Tahap terakhir, *peace-building*, memiliki nuansa kultural yang kental karena tahap ini bertujuan untuk melakukan perombakan-perombakan struktur sosial-budaya yang dapat mengarah kepada pembentukan komunitas perdamaian yang langgeng.<sup>19</sup>

### △ Tahap Mencari De-Eskalasi Konflik

Di tahap pertama, konflik yang terjadi diwarnai oleh pertikaian bersenjata yang memakan korban jiwa sehingga pengusung resolusi konflik berupaya untuk menemukan waktu yang tepat untuk memulai (entry point) proses resolusi konflik.

---

<sup>17</sup> Lihat juga Fisher, Simon, (et. al). "*mengelola konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*", The Brithish Council, Grafika Desa Putra, Jakarta, 2001, hal 7.

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Ibid

Tahap ini masih berurusan dengan adanya konflik bersenjata sehingga proses resolusi terpaksa harus bergandengan tangan dengan orientasi militer.

Proses resolusi dapat dimulai jika didapat indikasi bahwa pihak-pihak yang bertikai akan menurunkan tingkat eskalasi konflik. De-eskalasi ini dapat dilakukan dengan melakukan intervensi militer yang dilakukan oleh pihak ketiga internasional berdasarkan mandat BAB VI dan VII Piagam PBB.<sup>20</sup>

#### △ Tahap Intervensi Kemanusiaan dan Negosiasi Politik

Intervensi kemanusiaan ini dilakukan dengan menerapkan prinsip *mid-war operation*.<sup>21</sup> Prinsip ini merupakan salah satu perubahan dasar dari intervensi kemanusiaan di dekade 90-an, mengharuskan intervensi kemanusiaan untuk tidak lagi bergerak di lingkungan pinggiran konflik bersenjata tetapi harus bisa mendekati titik sentral peperangan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa korban sipil dan potensi pelanggaran HAM terbesar ada di pusat peperangan dan di lokasi tersebut tidak ada yang bisa melakukan operasi penyelamatan selain pihak ketiga.

Intervensi kemanusiaan tersebut dapat dilakukan bersamaan dengan usaha untuk membuka peluang (*entry*) diadakannya negosiasi antar elit.<sup>22</sup> Dengan demikian, tahap ini kental dengan orientasi politik yang bertujuan untuk mencari kesepakatan politik (*political settlement*) antara aktor konflik.

---

<sup>20</sup> Ibid. Perlu diperhatikan bahwa isi dari BAB VI piagam PBB adalah tentang investigasi dan mediasi persengketaan. Sedangkan BAB VII adalah untuk memberikan sanksi ekonomi, diplomatik dan militer selain penggunaan kekuatan militer, untuk menyelesaikan persengketaan.

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Ibid.

### △ Tahap Problem-Solving Approach

Tahap ketiga dari proses resolusi konflik adalah *problem-solving* yang memiliki orientasi sosial. Tahap ini menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi pihak-pihak antagonis untuk melakukan transformasi yang spesifik ke arah resolusi. Transformasi konflik dikatakan berhasil jika dua kelompok yang bertikai dapat mencapai pemahaman timbal-balik (*mutual understanding*) tentang cara untuk mengeksplorasi alternatif-alternatif penyelesaian konflik yang langsung dikerjakan oleh masing-masing komunitas.

Menurut Rothman terdapat empat komponen utama proses *problem-solving*. Pertama adalah masing-masing pihak mengakui legitimasi pihak lain untuk melakukan inisiatif komunikasi tingkat awal. Kedua adalah masing-masing pihak memberikan informasi yang benar kepada pihak lain tentang kompleksitas konflik yang meliputi sebab-sebab konflik, trauma-trauma yang timbul selama konflik, dan kendala-kendala struktural yang akan menghambat fleksibilitas mereka dalam melakukan proses resolusi konflik. Ketiga adalah kedua belah pihak secara bertahap menemukan pola interaksi yang diinginkan untuk mengkomunikasikan sinyal-sinyal perdamaian. Keempat adalah *problem-solving workshop* yang berupaya menyediakan suatu suasana yang kondusif bagi pihak-pihak bertikai untuk melakukan resolusi konflik.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid.

### △ Tahap *Peace-Building*

Tahap keempat adalah *peace-building* yang meliputi tahap transisi, tahap rekonsiliasi dan tahap konsolidasi. Tahap ini akan memakan waktu lama karena memiliki orientasi struktural dan kultural.<sup>24</sup>

Pada tahap transisi akan meliputi lima proses yaitu: pemilihan bentuk struktur negara, pelimpahan kedaulatan negara, pembentukan sistem trias-politica, pembentukan sistem pemilihan umum, pemilihan bahasa nasional untuk masyarakat multi-etnik, dan pembentukan sistem peradilan.

Tahapan rekonsiliasi perlu dilakukan jika potensi konflik terdalam yang akan dialami oleh suatu komunitas adalah rapuhnya kohesi sosial masyarakat karena beragam kekerasan struktural yang terjadi dalam dinamika sejarah komunitas tersebut

Pada tahapan konsolidasi, aktor-aktor yang relevan diharuskan untuk melakukan intervensi perdamaian terhadap struktur sosial secara terus-menerus dengan dua tujuan yaitu mencegah terulangnya konflik yang melibatkan kekerasan bersenjata serta mengkonstruksikan proses perdamaian langgeng yang dapat dijalankan sendiri oleh pihak-pihak yang bertikai. Kedua tujuan ini dilakukan melalui kegiatan mengoperasionalkan indikator sistem peringatan dini (*early warning system*) dan mengembangkan beragam mekanisme resolusi konflik lokal yang melibatkan sebanyak mungkin aktor-aktor non militer di berbagai

---

<sup>24</sup> Ibid.

tingkat eskalasi konflik.<sup>25</sup> Contohnya, *Non-Governmental Organisations* (NGOs), mediator internasional, atau institusi keagamaan.

Dalam kasus konflik di Thailand Selatan ini teori digunakan untuk membahas upaya Pemerintah Thaksin Shinawatra dalam meredam dan menyelesaikan konflik separatisme yang dilakukan masyarakat Pattani tersebut. Pemerintah Thaksin mencoba untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Pada tahap pertama, Pemerintahan Thaksin masih menggunakan strategi militer untuk mengendalikan kekerasan bersenjata yang terjadi. Kemudian pada tahap kedua Pemerintahan Thaksin memiliki orientasi politik yang lebih jelas dan memulai proses re-integrasi elit politik dari kelompok-kelompok yang bertikai.

Pada tahapan selanjutnya, Pemerintah Thaksin menerapkan *problem-solving approach*. Sedangkan pada tahap terakhir pemerintahan Thaksin mencoba melakukan perombakan-perombakan struktur sosial-budaya yang dapat mengarah kepada perdamaian.

Aplikasi di atas dapat dijadikan sebagai gambaran bahwa pemerintahan Thaksin melakukan upaya rekonsiliasi konflik untuk menyelesaikan konflik separatisme Patani di Thailand Selatan.

---

<sup>25</sup> Ibid.

## **F. Hipotesa**

Dari rumusan masalah di atas maka dapat diambil hipotesis yaitu:

Kebijakan Thaksin Shinawatra dalam Mengelola Konflik Yaitu Melalui Empat

Tahap

- Mencari De-Eskalasi Konflik, di tahap ini pemerintah Taksin masih menggunakan strategi militer untuk mengendalikan kekerasan bersenjata.
- Intervensi Kemanusiaan dan Negosiasi Politik, pemerintah Thaksin memulai proses re-integrasi elit politik dari kelompok-kelompok yang bertikai.
- Problem-Solving Approach, pemerintah Thaksin mencoba menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi pihak-pihak yang bertikai untuk melakukan resolusi.
- Peace-Building, pemerintah Thaksin mencoba melakukan perombakan struktur sosial budaya yang dapat mengarah pada perdamaian.

## **G. Metode Penelitian dan Pengumpulan Data**

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis, yaitu menjelaskan dan menganalisa permasalahan berdasarkan analisis isi dan informasi yang dikumpulkan. Pengumpulan data berdasarkan data sekunder, yang bersumber pada buku-buku literatur, surat kabar, majalah-majalah, jurnal-jurnal ilmiah dan sumber-sumber lain yang dianggap relevan dalam penelitian ini. Namun tidak menutup kemungkinan penggunaan data-data baru yang mendukung penulisan skripsi ini.



## **H. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian yang diteliti penulis adalah selama Thailand dipimpin oleh Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Agar isi dari penelitian ini tidak mengarah kepada sub yang lebih luas dari yang diteliti sehingga isi dari penelitian ini dapat lebih sempurna.

## **I. Sistematika Penulisan**

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang isinya ringkasan singkat dari keseluruhan bab-bab yang ada. Di dalamnya berisi alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar berfikir, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II, menceritakan masuknya Patani untuk pertama kali ke dalam wilayah Thailand dan terjadi ketidakadilan dari pemerintah pusat terhadap Melayu Muslim. Dengan adanya ketidakadilan tersebut Rakyat Patani mencoba melakukan pemberontakan sehingga memunculkan gerakan separatisme.

BAB III, mencoba menjelaskan tentang metode resolusi konflik Perdana Menteri sebelum Perdana Menteri Thaksin Shinawatra

BAB IV, mencoba menggambarkan langkah dan upaya resolusi konflik dalam pemerintahan Thaksin Shinawatra. Selain itu juga membahas keefektifan resolusi konflik untuk menyelesaikan konflik patani

BAB V, berupa kesimpulan.